

## Kepedulian masyarakat sehat sebagai bentuk bela negara pada pilkada serentak di Bantul

### Healthy community care as a form of state defense In the simultaneous local elections in Bantul

Muhammad Salisul Khakim<sup>1\*</sup>, Agil Dhiemitra Aulia Dewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

\*Email: muhammad.salis@unisayogya.ac.id; agildhiemitra@unisayogya.ac.id

\*Corresponding Author: Muhammad Salisul Khakim

Tanggal Submisi: 31 Maret 2022; Tanggal Penerimaan: 23 April 2022

#### ABSTRAK

Artikel ini berupaya menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban melakukan bela negara di tengah pandemi Covid-19 sesuai dengan peran dan kapasitas di wilayahnya masing-masing sebelum maupun setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul. Salah satu kegiatan bela negara yang relevan pada masa ini dilakukan melalui edukasi hidup sehat. Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Bantul dapat dikatakan paling tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Padukuhan Mertosanan Desa Potorono Kecamatan Banguntapan merupakan salah satu wilayah di Bantul dengan kasus yang tinggi, sementara itu mobilitas sosial masyarakat masih tergolong cukup tinggi pula tanpa diimbangi dengan edukasi terkait pandemi Covid-19. Pengabdian ini dilakukan dengan metode koordinasi, promosi, sosialisasi, pemberdayaan sumber daya masyarakat, dan edukasi, hingga metode monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dengan kepedulian masyarakat sehat sebagai bentuk bela negara di tengah pandemi Covid-19. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk melakukan bela negara sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Kegiatan gotong royong saling membantu bagi warga terdampak Covid-19 dengan iuran kampung, membagikan sembako, membagikan alat-alat kesehatan, hingga menjaga kebersihan di tempat pelayanan publik seperti Masjid.

**Kata Kunci:** Covid-19; bela negara; edukasi kesehatan; gotong royong; pilkada

#### ABSTRACT

*This article aims to explain that every community has an obligation to defend the country in the midst of the Covid-19 pandemic in accordance with the roles and capacities in their respective regions before and after the Bantul Regional Head Election. One of the relevant national defense activities at this time was through education on healthy living. The positive confirmed case of Covid-19 in Bantul can be said to be the highest in the Special Region of Yogyakarta. Mertosanan Padukuhan, Potorono Village, Banguntapan District is one of the areas in Bantul with high cases, meanwhile the social mobility of the community is relatively high without education related to the Covid-19 pandemic. This service is carried out by methods of coordination, promotion, socialization, empowerment of community resources, and education, as well as methods of monitoring, evaluating and reporting related to caring for healthy communities as a form of defending the country in the midst of the Covid-19 pandemic. The results of this service show that the community has the potential to defend the country according to their respective roles and capacities. Mutual cooperation activities help each other for residents to prevent Covid-19 with village fees, distributing groceries, distributing medical equipment, and maintaining cleanliness in public service places such as mosques.*

*Keywords:* Covid-19; defend the country; health education; local election; mutual cooperation

#### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menjadi musibah bagi seluruh dunia. Berdasarkan analisis situasi menunjukkan bahwa di

daerah Bantul memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19 dilihat dari masih tingginya angka temuan baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19,

salah satu penyebabnya adalah masih cukup banyak masyarakat yang belum taat pada protokol Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku masyarakat yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar, seperti di dalam pasar, masjid, dan tempat publik lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan dan pencegahan terhadap situasi tersebut, baik terkait pola kehidupan yang sehat bagi masyarakat diantaranya dengan sosialisasi dan edukasi secara sederhana kepada masyarakat mengenai cara pencegahan Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran virus penyebabnya.

Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia telah melintasi tahapan baru, yakni pendaftaran pasangan bakal calon perseorangan dan dari partai politik. Hiruk-pikuk dinamika politik di daerah yang menyelenggarakan pilkada terpantau dengan jelas dari beragam platform media. Pawai, arak-arakan, dan rombongan yang berbondong-bondong ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi ciri yang selalu mewarnai pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah (Margianto, 2020).

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menimbulkan polemik di tengah pandemi corona yang terjadi di Tanah Air. Selain kasus harian infeksi virus corona di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Jumlah korban jiwa akibat SARS-CoV-2 tersebut juga terus bertambah. Bahkan, sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum juga terinfeksi virus yang

menyerang saluran pernapasan tersebut.

Akibatnya, pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember tersebut dikhawatirkan menimbulkan klaster baru, mengingat proses Pilkada dilakukan dengan melibatkan dan mengumpulkan orang. Kendati demikian, sejumlah pihak tetap mendorong agar pelaksanaan Pilkada tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan segala pertimbangannya.

Fadjroel Rachman menyatakan Pilkada Serentak 2020 tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat, yakni hak dipilih dan memilih. Oleh karena itu, Pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Fadjroel menambahkan, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, lantaran tidak ada satu pun yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir (Margianto, 2020).

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda dan ditinjau kembali. Usul penundaan itu diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi. Terutama, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia kian bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada yang juga dapat berpotensi

menjadi klaster. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pun mendesak agar Pilkada ditunda. PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat (Dewi, 2020).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali memperbaharui data pengawasannya, dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada serentak 2020. Dalam pengawasannya di hari kedua, Minggu 27 September 2020, Bawaslu menemukan 10 daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyebutkan, sejumlah protokol kesehatan Covid-19 yang dilanggar diantaranya seperti; pembatasan jumlah peserta kampanye, penggunaan masker, menjaga jarak, hingga tidak adanya fasilitas untuk mencuci tangan. "Daerah tersebut adalah Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, Tojo Una-Unan, dan Bungo (Utama, 2020).

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung kebijakan Komisi Pemilihan Umum terkait larangan kegiatan kampanye terbuka atau bentuk rapat umum bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020. "Yang jelas sudah ditetapkan tidak boleh ada kampanye terbuka, kampanye hanya boleh dilaksanakan *indoor* dengan jumlah audien 50 orang, saya kira ini sebuah kebijakan bagus yang bisa mendukung

pengendalian COVID-19 di Bantul," kata Sekretaris Daerah Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Minggu. Tahapan kampanye bagi paslon bupati dan wakil bupati pada peserta Pilkada Bantul dilakukan sejak 26 September sampai 5 Desember, karena itu, dia berharap ketentuan tersebut dapat dipatuhi peserta pilkada dan masyarakat simpatisan atau pendukung calon (Sidik, 2020). Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga (Ristyawati, 2020).

Berdasarkan analisis permasalahan yang sedang terjadi pada mitra di atas, dapat dilihat bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah yang rawan terhadap penyebaran covid-19, yaitu karena adanya pendaftaran bakal calon bupati Bantul yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini akan berbahaya bagi mitra jika tidak dilakukan penanganan khusus, berupa sosialisasi edukasi pola kesehatan masyarakat, serta sosialisasi edukasi terkait kepedulian masyarakat untuk gotong royong dan berdemokrasi pada pemilihan bupati Bantul tahun 2020 ini.

## **METODE**

Pengabdian masyarakat terkait kepedulian masyarakat sehat dalam berpolitik cerdas pasca Pilkada 2020 di

Potorono Banguntapan Bantul ini dilaksanakan dengan prinsip metode gotong royong sebagai upaya bela negara dalam menyelesaikan permasalahan politik dan kesehatan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini. Metode yang digunakan untuk merealisasikan program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diawali dengan persiapan dan koordinasi, yaitu bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari penentu kebijakan Ketua Rukun Tangga dan warga masyarakat terhadap kelancaran dan keberlangsungan pembentukan dan pelaksanaan pendidikan politik dan kesehatan.
- b. Metode promosi dan sosialisasi kepedulian masyarakat sehat dalam berpolitik dan pasca Pilkada, yaitu bertujuan untuk memperkenalkan pola hidup sehat dan penyampaian aspirasi politik masyarakat.
- c. Metode pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu pengelola dan pengurus rukun tangga untuk mengajak warganya dalam melakukan Bela Negara Peduli Sehat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan memberdayakan SDM.
- d. Metode edukasi bela negara terkait dengan melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya nilai demokrasi dan gotong royong dalam Pilkada serentak tahun 2020.
- e. Metode edukasi hidup sehat dengan melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan terkait pola hidup sehat dan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

- f. Melakukan edukasi politik terkait tata cara pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang sehat pada era pandemi covid-19.
- g. Metode Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yaitu dilakukan oleh pengelola program untuk mendeteksi adanya hambatan pada pelaksanaan program dengan harapan dapat digunakan untuk perbaikan pada pelaksanaan program berikutnya. Sementara itu, pelaporan kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan dan pengurus, yang dapat dijadikan sebagai data politik dan kesehatan warga masyarakat yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi menunjukkan bahwa di daerah Bantul memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran Covid-19 dilihat dari masih tingginya angka temuan baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada masa sebelum maupun sesudah dilaksanakannya Pilkada. Salah satu penyebabnya adalah masih cukup banyak masyarakat yang belum taat pada protokol Kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan dan pencegahan terhadap situasi tersebut, baik terkait pola kehidupan yang sehat bagi masyarakat diantaranya dengan sosialisasi dan edukasi secara sederhana kepada masyarakat mengenai cara pencegahan Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran virus penyebabnya.

Covid-19 adalah penyakit menular infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh salah satu jenis corona

virus (SARS-Cov 2). Gejala khas yang paling umum adalah demam, batuk kering, rasa Lelah. Gejala lain yang mungkin dialami oleh beberapa pasien adalah sakit tenggorokan, hidung tersumbat, diare, kehilangan indera rasa atau pembau/ keduanya. Cara mencegahnya adalah dengan menjaga imun tubuh dan menerapkan 5M, yaitu menerapkan selalu protocol Kesehatan (5M) terutama jika keluar dari rumah yaitu dengan memakai masker (*double* masker medis dan masker kain), menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjauhi kerumunan, hindari menyentuh area wajah sebelum cuci tangan, membatasi mobilitas. Selain itu juga menjaga imunitas dan Kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga teratur, dan cukup istirahat.

Kendati problem akibat pandemi cukup kompleks mulai dari ekonomi dan sosial keagamaan. Kemudian pemerintah juga dibuat gamang dan agak gagap dengan kondisi krisis. Realitasnya sejumlah kelompok masyarakat menunjukkan respon yang aktif dan adaptif terhadap kasus Covid-19 dan problem laten yang ditimbulkannya (Rahman, 2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 dipahami sebagai narasi kebijakan yang tepat apabila dibandingkan dengan menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan pemerintah telah membuat regulasi dan penyelenggaraan Pilkada telah mengacu pada protokol kesehatan. Pemerintah juga telah menjamin pelaksanaan Pilkada mengutamakan

keselamatan pemilih dan peserta Pilkada (Ristyastuti dan Rofii, 2021).

Ketika pemerintah menunjukkan keterbatasan dalam menyediakan jaring pengaman sosial, di sisi lain muncul berbagai aksi solidaritas dari masyarakat. Berakar pada inisiatif untuk saling membantu di tengah pandemi, aksi solidaritas ini menjadi upaya resiliensi masyarakat dalam merespon krisis yang terjadi (Ahmada, Marsetyo, dan Putri, 2020). Aksi solidaritas yang ada di Yogyakarta yang sering dilakukan adalah program *jogo tonggo*. Program ini merupakan implementasi nilai solidaritas sosial masyarakat khususnya gotong royong. Gotong royong sebagai modal, spirit, dan alat yang dimanfaatkan untuk melawan covid-19 secara struktural dan secara efektif Program *jogo tonggo* mampu dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan baik dan tanpa kesulitan (Ratih dan Putri, 2021).

Sementara itu, peran yang bisa dilakukan sebagai warga negara dalam pandemi covid ini adalah wajib melakukan bela negara dalam melawan pandemi ini, hingga terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat hingga sejahtera. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Bela negara tidak selalu berkaitan dengan politik praktis, dalam hal ini

masyarakat pada saat pandemi dapat melakukan bela negara sebagai berikut:

- a. Sesuai profesi kita masing-masing, seperti tenaga kesehatan yang berjuang di RS, peneliti, politisi, pedagang, takmir masjid, ibu rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya untuk mewujudkan kesehatan hingga berdampak pada kesejahteraan bersama.
- b. Menjaga protokol kesehatan, tempat ibadah, pendidikan, ekonomi, hingga sosial.
- c. Vaksinasi, mendukung agar sehat, terjaga ekonomi hingga sosialnya, pekerjaan berjalan lancar, hingga kesejahteraan masyarakat.
- d. Gotong royong, bantu membantu jika ada warga terdampak, baik karena terkonfirmasi positif ataupun yang kehilangan dibantu dengan sembako, makanan, uang tunai dsb, apalagi seperti berbagi daging qurban, atau mengalokasikannya dengan barang yang lebih bermanfaat selain daging, seperti obat-obatan, vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga tabung oksigen.
- e. Pada sisi yang lain, partisipasi politik juga tetap dibutuhkan, seperti hingga ikut serta dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam kebebasan berdemokrasi secara bijak, hingga mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dikatakan memberikan hasil yang cukup signifikan, yaitu dengan semakin meningkatnya masyarakat dalam menggunakan masker yang baik dan benar, serta menggunakan

handsanitizer di tempat-tempat publik, seperti di pasar, masjid, dan yang lainnya. Namun demikian kegiatan ini perlu terus dikembangkan agar wilayah tersebut menjadi mandiri dan siap melakukan perubahan dari pandemi menjadi endemi.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak juga cukup tinggi dengan adanya program bela negara ini. Adapun faktor penyebab tingginya tingkat partisipasi tersebut antara lain: keberhasilan penyelenggara pemilu KPU sampai dengan tingkat KPPS mensosialisasikan protokol kesehatan; semakin tingginya kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilihan yang bersifat jujur dan adil; semakin tingginya tingkat kompetisi di daerah dengan mobilisasi yang sangat tinggi bagi pemilih (Saleh, 2022). Hal ini semakin menunjukkan bahwa program pengabdian ini menjadi media yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik sebagai bentuk bela negara di tengah pandemi.

## KESIMPULAN

Bela negara yang dapat dilakukan dalam kondisi pandemi dengan mematuhi anjuran pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, diantaranya dengan menjaga protokol Kesehatan, vaksinasi, gotong royong *jogo tonggo* yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi secara bijak. Selain mematuhi anjuran pemerintah, masyarakat perlu menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi

seimbang sesuai kebutuhan, cukup istirahat dan teratur berolahraga.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan dan memfasilitasi program pengabdian ini dengan baik mulai dari persoapan proposal hingga publikasi karya ilmiahnya.

### REFERENSI

- Ahmada, Saqib F., Marsetyo, Fernandito D., Putri, Rizqy A. (2020). Solidaritas Pangan Jogja sebagai Aktor Alternatif Penyedia Kesejahteraan di Masa Krisis Pandemi COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 2020, 1-13
- Dewi, Retia Kartika. (2020). Pro dan Kontra Menanggapi Pilkada di Tengah Pandemi Corona. Diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/061500865/pro-dan-kontra-menanggapi-pilkada-di-tengah-pandemi-corona-?page=all>.
- Margianto, Heru. (2020). Dilema Pilkada di Tengah Corona. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/16/09124981/dilema-pilkada-di-tengah-corona?page=all>.
- Rahman, Muhammad Fathur. (2020). Representasi Masyarakat Aktif Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Ekonomi dan Sosial Keberagamaan di Bausasran Danurejan Yogyakarta). *Jurnal Penelitian*, 14(2), 185-216.
- Ratih Probosiwi dan Afrinia Lisdiyati Putri. (2021). Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 177-192.
- Ristyastuti, Maria P., Rofii, Muhammad S. (2021). Analisis Naratif Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2), 47-53.
- Ristyawati, Aprista. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 2(2), 85-96.
- Saleh, Muh. (2022). Partisipasi Politik (Sebuah Analisa Pemilukada Pada Masa Pandemi Covid). *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 10(1), 146-159.
- Sidik, Hery. (2020). Bantul dukung larangan kampanye terbuka dalam pilkada 2020. Diakses pada <https://jogja.antaranews.com/berita/453113/bantul-dukung-larangan-kampanye-terbuka-dalam-pilkada-2020>
- Utama, Felldy. Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Temukan 10 Daerah Langgar Protokol Kesehatan <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/28/337/2284914/kampanye-pilkada-2020-bawaslu-temukan-10-daerah-langgar-protokol-kesehatan>